

**PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1 pada
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

AUNU ROFIEQ FADHLAN
C100120171

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

AUNU ROFIEQ FADHLAN
C100120171

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hartanto', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.

(Hartanto, S.H., M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Oleh:

AUNU ROFIEQ FADHLAN
C100120171

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Rabu, 7 Juni 2017

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

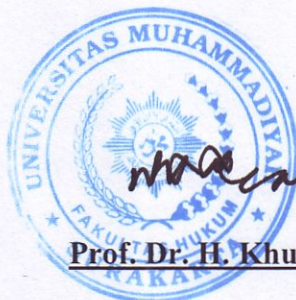
1. Hartanto, S.H., M.Hum.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Muchamad Iksan, S.H. M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Kuswardani, S.H., M.Hum.
(Anggota II Dewan Penguji)

()

()

()

Dekan,



Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 10 April 2017

Penulis



AUNU ROFIEQ FADHLAN
C100120171

PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dan langkah-langkah yang ditempuh oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengendalikan peredaran narkotika serta mengetahui hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya tersebut. Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer yakni wawancara dan data sekunder yakni data hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara), kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY memiliki peran secara normatif meliputi penyelidikan dan penyidikan meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan yang dilaksanakan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Langkah yang ditempuh oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY untuk mengendalikan peredaran narkotika di Provinsi DIY melalui pencegahan, rehabilitasi dan pemberantasan narkotika. Hambatan yang dihadapi yakni kesulitan dalam menemukan tersangka karena sistem yang digunakan para pelaku menggunakan sistem sel terputus, kesulitan mengetahui penempatan atau peletakan narkotika, kesulitan menentukan pemakai atau jaringan narkotika dengan penjual atau bandar narkotika karena tidak saling mengenal, semakin canggihnya modus operandi para pengedar narkotika, dan minimnya informasi dari masyarakat sekitar saat penangkapan bandar narkotika.

Kata kunci: *penegakan hukum, tindak pidana narkotika, Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY*

ABSTRACT

This study aims to determine the role and the steps taken by the National Narcotics Agency Special Region of Yogyakarta to control drug trafficking and to know the obstacles faced in carrying out the task. The research method using descriptive empirical jurisdiction. The data source consists of the primary data and secondary data, interview the legal data of primary, secondary and tertiary. Data were collected through the study of literature and field research (interviews), then the data is analyzed qualitatively. The study concluded that the National Narcotics Agency Province of Yogyakarta has a role normatively include the investigation include arrest, detention, search, and seizure conducted by the Code of Criminal Procedure (Criminal Procedure Code) and Act No. 35 of 2009 on Narcotics. Steps to be taken by the National Narcotics Agency Province of Yogyakarta to control drug trafficking in the province through prevention, rehabilitation and eradication of narcotics. Obstacles faced by the difficulty in finding a suspect because the system used perpetrators use cell system is lost, the difficulty of knowing the placement or placement of narcotics, difficulties in determining the user or the network of narcotics with the seller or the city narcotics because they do not know each other, more sophisticated modus operandi of traffickers in narcotics, and the lack of information from the public about the city while catching narcotics.

Keywords: *law enforcement, narcotic crime, the National Narcotics Agency Province of DIY*

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar landasan dalam membentuk pemerintahan negara Indonesia menjelaskan secara tegas bahwa “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechstaat*)“ dan memiliki alat alat kelengkapan yang menurut Roeslan Saleh adalah “hukum pidana”. “Hukum pidana di sini dimaksudkan sebagai ketentuan-ketentuan yang lebih banyak berisikan suatu kebijakan mengatur dengan norma-norma hukum pidana”.¹

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama.² Sebenarnya ditinjau dari aspek yuridis peredaran narkotika adalah sah keberadaanya. Hanya saja di dalam Undang-Undang Narkotika melarang penggunaan narkotika tanpa izin dari undang-undang yang dimaksud. Penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan melainkan dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan disalahgunakan untuk kegiatan yang dapat merusak fisik dan psikis mental pemakai narkotika.

Sebagai kota miniatur Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi potensial bagi berkembangnya beragam budaya dari berbagai daerah termasuk budaya negatif pemakai Narkotika. “Berdasarkan data hasil penelitian BNN dan

¹Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2005. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hlm. 2.

²Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2010, *Narkotika dan Psikitropika*, Nuansa Aulia, Bandung, Hlm. 4

Universitas Indonesia (UI) menunjukan pemakai Narkotika di Yogyakarta pada tahun 2008 ada sebanyak 68.981 orang. Jumlah tersebut menempatkan Yogyakarta pada posisi kedua sebagai kota terbesar pemakai Narkotika setelah DKI Jakarta. Lalu pada tahun 2011 jumlah pemakai di Yogyakarta meningkat menjadi 83.952 orang dan pada tahun 2014 turun menjadi sebanyak 62.028 orang, tahun 2014 Yogyakarta menjadi rangking kelima.³ Pada tahun 2015 data penyalahgunaan narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat 60.182 orang⁴.

Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni: (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.⁵

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika. Namun, dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan narkotika tersebut.⁶

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang di dalamnya diatur juga sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, maka

³[Http://www.CendanaNews.com](http://www.CendanaNews.com). Diunduh pada tanggal 28 September 2016. Jam 22.00 WIB.

⁴[Http://www.PikiranRakyat.com](http://www.PikiranRakyat.com). Diunduh pada tanggal 28 September 2016. Jam 22.30 WIB.

⁵Siswantoro Sonarso. 2004. *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 142.

⁶O.C. Kaligis & Associates. 2002. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Bandung: Alumni. Hlm. 260.

Badan Narkotika Nasional diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkotika dewasa ini. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, hal mana belum diatur dalam undang-undang yang lama. Efektifitas berlakunya undang-undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni Badan Narkotika Nasional serta para penegak hukum yang lainnya. Oleh karena itu untuk mengatasi peredaran dan penyalahgunaan narkotika, BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta sangatlah memiliki peran penting, yang diharapkan dapat menanggulangi masalah narkotika karena BNNP DIY merupakan lembaga pemerintahan yang dikhususkan untuk menangani pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY dalam menjalankan tugas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, langkah-langkah apa yang harus ditempuh oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY untuk mengendalikan peredaran Narkotika, dan mengetahui hambatan-hambatan Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika. Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat, antara lain: (1) Manfaat teoritis, yakni (a) Memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, (b) Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya. (2) Manfaat praktis, antara lain: (a) Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya penegakan terhadap tindak pidana narkotika, (b) Sebagai bahan masukan dalam upaya penegakan terhadap tindak pidana narkotika.

2. METODE

Metode penelitian menggunakan metode normatif yuridis yang bersifat deskriptif.⁷ Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil dari wawancara dan data sekunder yaitu data hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara) kemudian data dianalisis secara kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY dalam Menjalankan Tugas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika

Narkotika berasal dari bahasa Yunani, dari kata *narke* yang berarti beku, lumpuh, dan dungu. Orang Amerika menyebutnya *narcotics* yang kemudian diikuti Indonesia dengan kata narkotika, sedangkan di Malaysia disebut dengan *dadah*. Narkotika ini diartikan sebagai obat bius, yang membuat orang tertidur. Biro Bea dan Cukai Amerika mendefinisikannya, bahwa narkotika adalah candu, ganja, cocaine, zat-zat mentahnya kemudian dioalah menjadi morfin, heroin, kodein, hashish, dan kokain. Di dalamnya juga termasuk narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang termasuk dalam *hallucinogen*, *depressant*, dan *stimulant*.⁸ Sementara itu, Organisasi Perserikatan Bangsa-bangsa yang bergerak dalam bidang kesehatan (WHO) mendefinisikan narkotika sebagai suatu zat yang apabila dimasukan ke dalam tubuh akan mempengaruhi fungsi fisik dan atau psikologi (kecuali makanan, air, atau oksigen).⁹

Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Pasal 65 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu merupakan perwakilan Badan Narkotika Nasional di daerah provinsi dan

⁷Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 35.

⁸Wilson Nadeak. 1978. *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*. Bandung: Offset. Hlm. 122.

⁹[Http://www.anncahira.com/narkoba/narkotika.htm](http://www.anncahira.com/narkoba/narkotika.htm). Diunduh pada tanggal 10 Desember 2016. Jam 10.30 WIB.

berkedudukan di ibukota provinsi. Menurut Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan instansi vertikal. Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY) merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi.

Menurut Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional mempunyai fungsi sebagai berikut: (a) Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya, (b) Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya, (c) Pengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam kegiatan pengadaan, pengendalian, dan pengawasan narkotika, psikotropika, prekursor narkotika, dan zat adiktif lainnya, (d) Pengoperasian satuan tugas-satuan tugas yang terdiri dari instansi pemerintahan terkait dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya, sesuai dengan bidang tugas masing-masing, (e) Pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya melalui satuan tugas-satuan tugas, (f) Pelaksanaan kerjasama nasional, regional, dan internasional dalam penanggulangan permasalahan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya, dan (g) Pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan laboratorium narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya.

Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY dalam menjalankan tugas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, antara lain: *Pertama*, peranan secara normatif yakni melakukan penyelidikan dan penyidikan tentang tindak pidana narkoba, antara lain: (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang mana di dalam undang-undang tersebut dalam Pasal 71 menjelaskan tentang dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan prekursor narkoba, (b) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional yang mana di dalam peraturan tersebut dalam Pasal 4 menjelaskan tentang kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional khususnya BNNP DIY bertugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor narkoba dan zat adiktif lainnya atau dalam disingkat dengan P4GN dan melaksanakan P4GN dengan membentuk satuan tugas yang terdiri atas unsur instansi pemerintah terkait sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menimbulkan konsekuensi pada penegak hukum atas tindak pidana yang menyangkut narkoba tersebut.

Peran serta warga negara Indonesia di dalam proses penegakan hukum sangatlah dibutuhkan, bukan hanya aparat penegak hukum saja. Proses penegakan hukum pidana termasuk penegak hukum terhadap tindak pidana narkoba melalui suatu sistem yang terdiri dari empat tahap proses, yaitu tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemidanaan, dan tahap pelaksanaan atau eksekusi. Penyidikan merupakan tahap awal dalam proses acara pidana dan merupakan tahap awal dalam proses penegakan hukum pidana tersebut.

Ketentuan penyidikan Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang secara khusus mengatur tentang penyidikan yang merupakan penjabaran dari Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Narkoba dirumuskan bahwa, dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana narkoba dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Narkoba. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa proses beracara dalam perkara tindak pidana narkoba juga menggunakan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), selama tidak diatur secara khusus (atau menyimpang) dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tersebut (*lex specialis derogate legi generalis*).

3.2. Langkah-langkah yang Ditempuh Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY untuk Mengendalikan Peredaran Narkotika

Langkah-langkah yang ditempuh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengendalikan peredaran narkotika di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di Kabupaten Sleman adalah: (1) Melalui Pencegahan, yakni (a) Memberikan penyuluhan-penyuluhan di masyarakat baik dikampus-kampus, di Rukun Tetangga dan sesuai permintaan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, (b) Secara umum, menayangkan di televisi maupun radio tentang dampak-dampak negatif narkotika, (c) Membuat satgas-satgas di suatu kelompok untuk menangkal, dan mencegah berkembangnya narkotika, (2) Rehabilitasi. Rehabilitasi ini diperuntukkan terhadap pecandu narkotika, baik sebagai korban atau menyalahgunakan narkotika. Dalam hal ini yang dimaksud korban seseorang yang hanya diajak orang lain menggunakan narkotika, dengan contoh terbukti positif menggunakan narkotika jenis ganja namun barang buktinya hanya 5 (lima) gram, (3) Pemberantasan Narkotika, melakukan pemberantasan narkotika apabila masih terdapat peredaran gelap narkotika. Sasaran pemberantasan ini terutama pada pengedar, bandar dan produsen. Di dalam pemberantasan ini petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sepakat apabila terdapat kasus narkotika apabila menurut unsur hukum terpenuhi tidak ada satu kasuspun yang ditangguhkan.¹⁰

Selanjutnya, dalam mengendalikan peredaran narkotika apabila dilihat dari Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah tepat yaitu melakukan pencegahan, dan melakukan rehabilitasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan,

¹⁰AKBP Mujiyana. Kabid Brantas Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Wawancara Pribadi. Yogyakarta. Tanggal 6 Maret 2017 Pukul 09.55 WIB.

Korban penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Namun kembali kepada kenyataan dilapangan bahwa dalam menanggulangi peredaran narkotika tersebut memang sangat sulit, hal tersebut dikarenakan para pelaku khususnya bandar dan pengedar narkotika memiliki modus operandi yang semakin canggih. Oleh karena itu diharapkan tiap penyidik dalam melakukan penyelidikan harus benar-benar dibutuhkan profesionalitasnya dan memanfaatkan semaksimal mungkin wewenang-wenang yang diberikan oleh undang-undang agar peredaran narkotika ini dapat ditekan semaksimal mungkin.

3.3. Hambatan-hambatan Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY dalam Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di Kabupaten Sleman bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum saja yang dalam hal ini adalah Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melainkan juga warga masyarakat yang sangat dibutuhkan peran sertanya, agar apa yang diamanatkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat terwujud. Di dalam undang-undang tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku penegak hukum telah diberi wewenang untuk melakukan tindakan baik tindakan represif maupun tindakan preventif. Walaupun memiliki wewenang yang diatur oleh undang-undang di atas, mengamankan undang-undang dengan melakukan penegakan hukum bukanlah hal yang mudah karena semakin kompleksnya permasalahan penyalahgunaan narkotika, dalam pelaksanaanya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika masih terdapat hambatan-hambatan yang disebabkan oleh berbagai faktor.

Hambatan-hambatan yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di Kabupaten Sleman adalah: (1) Kesulitan dalam menemukan tersangka tindak pidana narkotika karena sistem yang digunakan para pelaku menggunakan sistem sel terputus. Sel terputus yaitu pembeli atau jaringan narkotika tidak bertemu langsung dengan penjual atau bandar narkotika dan narkotika yang diperjual belikan tersebut hanya diletakkan di tempat-tempat yang telah disetujui sebelumnya, (2) Bandar narkotika telah memiliki data penempatan atau peletakan narkotika di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang sulit diketahui oleh penyelidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, (3) Pengembangan kasus narkotika petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menemui kesulitan karena pemakai atau jaringan narkotika dengan penjual atau bandar narkotika tidak saling mengenal, karena sistem sel terputus di atas, (4) Semakin canggihnya modus operandi para pengedar narkotika, dan (5) Dalam penangkapan bandar narkotika di dalam prakteknya informasi dari masyarakat disekitar tempat kejadian perkara sangat minim.¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang sangat serius. Karena semakin canggihnya para pelaku tindak pidana dalam menjalankan aksinya untuk tidak tertangkap aparat penegak hukum, sehingga peran petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana narkotika di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di Kabupaten Sleman sangat dibutuhkan, mengingat kasus penangkapan dengan barang bukti sebesar 1040 (seribu empat

¹¹AKBP Mujiyana. Kabid Brantas Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Wawancara Pribadi*. Yogyakarta, Senin, 6 Maret 2017, pukul 10.10 WIB.

puluh) gram shabu berada di wilayah hukum Kabupaten Sleman. Dalam menghadapi madus operandi sel terputus diharapkan petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan wewenangnya yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Pasal 77 ayat (1), (2), (3) mengenai penyadapan.

Sementara itu, dalam hal ini penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menyadap para jaringan narkotika dan bandar narkotika dengan menyadap orang-orang yang menurut bukti permulaan patut untuk dilakukan penyadapan. Sehingga sistem peredaran narkotika dengan sel terputus tersebut dapat diputus dan dapat dilakukan penangkapan terhadap para pelaku, dalam hal ini peran serta masyarakat sangat dibutuhkan agar dapat memberikan informasi yang dibutuhkan penyidik. Agar penegakan hukum yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat maksimal.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pertama, peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika. Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY memiliki peran secara normatif dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Provinsi DIY khususnya Kabupaten Sleman meliputi penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan meliputi: penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan yang dilaksanakan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Provinsi DIY khususnya di Kabupaten Sleman bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat

penegak hukum saja, melainkan peran serta masyarakat sangat dibutuhkan karena kejahatan berada dimasyarakat. Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY dalam menanggulangi tindak pidana narkoba di Provinsi DIY khususnya di Kabupaten Sleman dilakukan dengan upaya preventif maupun upaya represif. Upaya preventif yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY memberikan penyuluhan, memberikan bimbingan, membangun komunikasi dengan masyarakat tentang bagaimana agar narkoba tidak beredar dimasyarakat. Upaya represif dilakukan dengan melakukan penangkapan terhadap pengedar, penyalahguna, pecandu narkoba dan dilakukan langkah-langkah penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan apabila menurut unsur hukum terpenuhi diajukan ke pengadilan. Dasar pelaksanaan kewenangan ini yaitu KUHAP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Kedua, langkah-langkah yang ditempuh oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY Untuk mengendalikan peredaran narkoba, antara lain: (1) Pencegahan, yakni memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan membentuk satgas-satgas disuatu kelompok guna mencegah berkembangnya narkoba, (2) Rehabilitasi. Rehabilitasi ini diperuntukan terhadap pecandu narkoba, baik sebagai korban atau menyalahgunakan narkoba, (3) Pemberantasan narkoba yakni melakukan pemberantasan narkoba apabila masih terdapat peredaran gelap narkoba. Sasaran pemberantasan ini terutama pada pengedar, bandar dan produsen.

Ketiga, hambatan-hambatan yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, antara lain: (1) Kesulitan dalam menemukan tersangka tindak pidana narkoba karena sistem yang digunakan para pelaku menggunakan sistem sel terputus. Sel terputus yaitu pembeli atau jaringan narkoba tidak bertemu langsung dengan

penjual atau bandar narkoba dan narkoba yang diperjual belikan tersebut hanya diletakan di tempat-tempat yang telah disetujui sebelumnya, (2) Bandar narkoba telah memiliki data penempatan atau peletakan narkoba di wilayah Provinsi DIY yang sulit diketahui oleh penyelidik Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY, (3) Pengembangan kasus narkoba petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menemui kesulitan karena pemakai atau jaringan narkoba dengan penjual atau bandar narkoba tidak saling mengenal, karena sistem sel terputus, (4) Semakin canggihnya modus operandi para pengedar narkoba, dan (5) Penangkapan bandar narkoba di dalam prakteknya informasi dari masyarakat disekitar tempat kejadian perkara sangat minim.

4.2. Saran

Pertama, bagi Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hendaknya dalam memberikan penyuluhan, memberikan bimbingan, membangun komunikasi dengan masyarakat tentang bagaimana agar narkoba tidak beredar di masyarakat harus lebih diintensifkan.

Kedua, bagi penyelidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, agar dalam mengendalikan peredaran narkoba khususnya menanggulangi modus operandi sel terputus diharapkan dapat menggunakan wewenang penyadapan yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Ketiga, bagi masyarakat, hendaknya masyarakat membantu dan memberikan perhatian lebih kepada aparat penegak hukum mengenai informasi yang dibutuhkan Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY guna mengendalikan peredaran narkoba.

PERSANTUNAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada kedua orangtuaku tercinta atas doa dan dukungan moril maupun materiil yang tiada tara. Kakak dan adikku tersayang atas dukungan, doa dan semangatnya serta sahabat-sahabatku semuanya tanpa kecuali, terima kasih atas motivasi, dukungan dan doanya selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kaligis, O.C. & Associates. 2002. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Bandung: Alumni.

Nadeak, Wilson. 1978. *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*. Bandung: Offset.

Sonarso, Siswanto. 2004. *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2005. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sunggono, Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tim Redaksi. 2010. *Narkotika dan Psikotropika*, Nuansa Aulia, Bandung: Nuansa Aulia.

Internet/Website

<http://www.CendanaNews.com>. Diunduh pada tanggal 28 September 2016. Jam 22.00 WIB.

<http://www.PikiranRakyat.com>. Diunduh pada tanggal 28 September 2016. Jam 22.30 WIB.

<http://www.anncahira.com/narkoba/narkotika.htm>. Diunduh pada tanggal 10 Desember 2016. Jam 10.30 WIB.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.